

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
NOMOR KEP. XXX/M.EKON/XX/XX/2023
TANGGAL XX XXX 2023

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya disebut Kementerian, menyusun Arsitektur SPBE Kementerian dengan mengacu pada Arsitektur SPBE nasional. Untuk itu dalam penyusunannya Arsitektur SPBE Kementerian dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional. Keselarasan dilakukan melalui penggunaan referensi arsitektur. Selanjutnya Arsitektur SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar untuk:

1. Penyusunan Proses Bisnis Kementerian;
2. Penggunaan data dan informasi Kementerian;
3. Pembangunan Infrastruktur SPBE Kementerian;
4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
5. Penerapan Keamanan SPBE Kementerian;
6. Penerapan integrasi Layanan SPBE Kementerian;
7. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian;
8. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian; dan
3. perubahan pada Unsur SPBE Kementerian atau perubahan rencana strategis Kementerian untuk Arsitektur SPBE Kementerian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Arsitektur SPBE Kementerian adalah untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi Kementerian.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Arsitektur SPBE Kementerian memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu Kementerian.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kementerian

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi SPBE Nasional, arah kebijakan dan strategi SPBE Kementerian melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan sumber daya manusia SPBE Kementerian.

1. Tata Kelola SPBE Kementerian

Diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE Kementerian dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Kementerian dan kebijakan SPBE Kementerian untuk mewujudkan SPBE Kementerian yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE Kementerian, pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian, penyederhanaan dan pengintegrasian Proses Bisnis pemerintahan di Kementerian, dan penyusunan kebijakan SPBE Kementerian yang terpadu. Inisiatif strategis dari kegiatan Tata Kelola SPBE Kementerian dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. Pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian;
- b. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kementerian, sebagai penyelenggara SPBE Kementerian;
- c. Penguatan kebijakan SPBE Kementerian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE Kementerian;
- e. Perencanaan dan penganggaran SPBE Kementerian berbasis Arsitektur SPBE Kementerian; dan
- f. Penyelenggaraan manajemen perubahan SPBE Kementerian.

2. Layanan SPBE Kementerian

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah di tingkat kementerian dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Inisiatif strategis dari kegiatan Layanan SPBE Kementerian berupa:

- a. pelaksanaan survei pengguna SPBE Kementerian;
- b. pemanfaatan portal pelayanan publik yang terintegrasi;

- c. pemanfaatan portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan manajemen layanan Kementerian.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK Kementerian diarahkan untuk pengintegrasian TIK Kementerian dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi di tingkat Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Infrastruktur SPBE Kementerian. Inisiatif strategis dari TIK Kementerian berupa:

- a. penyediaan pusat data Kementerian;
- b. penyediaan Jaringan Intra Kementerian;
- c. penyediaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian;
- d. penyediaan akses berkualitas terhadap Layanan SPBE Kementerian;
- e. pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai Kementerian;
- f. pemanfaatan portal data nasional;
- g. pembangunan sistem keamanan informasi Kementerian;
- h. pemanfaatan teknologi analitika data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat; dan
- i. penyelenggaraan manajemen TIK SPBE Kementerian.

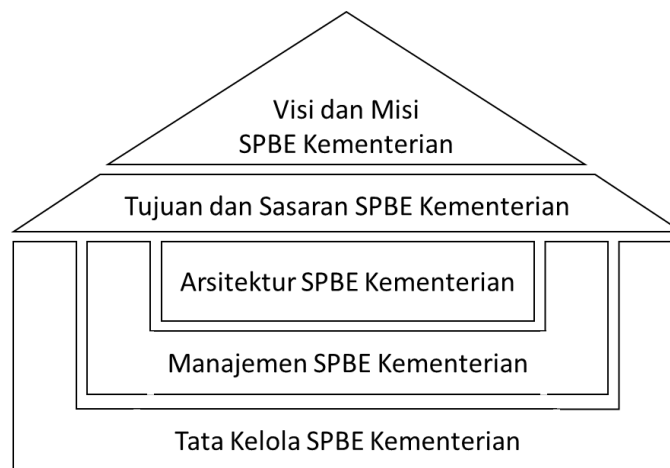
4. Sumber Daya Manusia SPBE Kementerian

Sumber daya manusia SPBE Kementerian diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE Kementerian serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kementerian. Pengembangan sumber daya manusia SPBE Kementerian dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE Kementerian, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE Kementerian, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak. Inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE Kementerian berupa:

- a. promosi literasi SPBE Kementerian;
- b. peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE Kementerian;
- c. pemanfaatan forum kolaborasi SPBE Nasional; dan
- d. penyelenggaraan Manajemen SPBE Kementerian.

B. Kerangka Kerja SPBE Kementerian

Kerangka kerja SPBE Kementerian pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk melaksanakan SPBE Kementerian. Kerangka kerja SPBE Kementerian tersusun dari visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE Kementerian, serta Tata Kelola SPBE Kementerian, Manajemen SPBE Kementerian, dan Arsitektur SPBE Kementerian.



Gambar 2.1. Kerangka Kerja SPBE Kementerian

1. Visi SPBE Kementerian

Terwujudnya sistem Kementerian yang terpadu dan menyeluruh untuk menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel.

2. Misi SPBE Kementerian

Untuk mencapai visi SPBE Kementerian, misi SPBE Kementerian adalah:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan Tata Kelola SPBE Kementerian yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan Kementerian berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi TIK Kementerian yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun sumber daya manusia Kementerian yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tujuan SPBE Kementerian

Berdasarkan visi dan misi SPBE Kementerian, tujuan SPBE Kementerian adalah:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kementerian.
- b. mewujudkan pelayanan Kementerian yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan SPBE Kementerian yang terpadu.

4. Sasaran SPBE Kementerian

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE Kementerian, sasaran SPBE Kementerian adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan Manajemen SPBE Kementerian yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya Layanan SPBE Kementerian yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya Infrastruktur SPBE Kementerian yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE Kementerian.

5. Tata Kelola SPBE Kementerian

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kementerian yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik Kementerian yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan melalui Tata Kelola SPBE Kementerian. Tata Kelola SPBE Kementerian diterapkan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Kementerian secara terpadu.

6. Manajemen SPBE Kementerian

Manajemen SPBE Kementerian adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung operasional layanan pemerintah di Kementerian yang berkualitas. Kualitas yang diharapkan tercapai dipastikan melalui pelaksanaan Audit TIK Kementerian secara berkala, untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen SPBE Kementerian.

7. Arsitektur SPBE Kementerian, dijelaskan dalam BAB V.

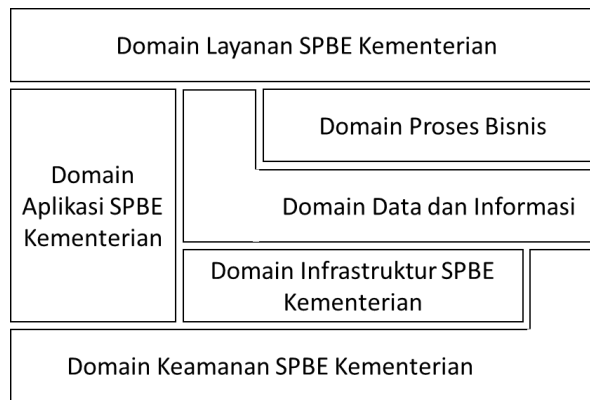
C. Arah Kebijakan Pembangunan SPBE Kementerian

Arah kebijakan pembangunan SPBE Kementerian menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan SPBE nasional, yaitu untuk mendukung pembangunan pada sektor pemerintahan umum pada bagian urusan perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

Selaras dengan Arsitektur SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian memiliki pola agar dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi di Kementerian. Pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi di Kementerian dari domain Proses Bisnis, domain data dan informasi, serta domain Layanan SPBE Kementerian, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek TIK melalui domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian.



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kementerian

A. Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

1. Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Domain arsitektur Proses Bisnis berupa fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan Kementerian merupakan penjelasan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sub fungsi pemerintahan merupakan penjelasan lebih rinci dari fungsi pemerintahan di Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Proses Bisnis terdiri dari berbagai macam Proses Bisnis pemerintahan di Kementerian yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah di Kementerian. Dengan demikian domain Proses Bisnis Kementerian berelasi langsung dengan domain Layanan SPBE Kementerian dan domain data dan informasi Kementerian.

B. Kerangka Kerja Arsitektur Data Elektronik dan Informasi

1. Struktur Arsitektur Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi terdiri dari data topik dan data sub topik Kementerian. Data topik merupakan data lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional dan dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Data sub topik merupakan data lebih rinci dari data topik Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur Proses Bisnis, domain Layanan SPBE Kementerian, domain Aplikasi SPBE Kementerian dan domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian. Domain data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan melalui domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian.

C. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

1. Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian terdiri dari kategori layanan dan sub kategori layanan. Kategori layanan, menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Kategori layanan terelasi dengan area layanan di tingkat nasional. Sub kategori layanan merupakan penjelasan lebih rinci dari kategori layanan Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain bisnis proses Kementerian, domain data dan informasi Kementerian, dan domain Aplikasi SPBE Kementerian.

D. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

1. Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian terdiri dari kategori aplikasi dan sub kategori aplikasi. Kategori aplikasi, menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian, sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Kategori aplikasi terelasi dengan area aplikasi di tingkat nasional. Sub kategori aplikasi, menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Layanan SPBE Kementerian, domain data dan informasi, domain Infrastruktur SPBE Kementerian dan domain Keamanan SPBE Kementerian.

E. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

1. Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kementerian memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, serta data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain data dan informasi, dan domain Keamanan SPBE Kementerian.

F. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE

1. Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Kementerian akan mendefinisikan penerapan Keamanan SPBE Kementerian berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain data dan informasi, dan domain Infrastruktur SPBE Kementerian.

BAB IV

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

Arsitektur SPBE Kementerian disusun berdasarkan referensi yang ada di tingkat nasional, yaitu Referensi Arsitektur SPBE dan Metadata Arsitektur SPBE.

A. Referensi Arsitektur SPBE Kementerian

1. Referensi Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis Kementerian merupakan turunan dari referensi Proses Bisnis di tingkat nasional, yaitu Pertahanan dan Luar Negeri (01), Ekonomi dan Industri (02), Pembangunan Kewilayahan (03), Pendidikan dan Tenaga Kerja (06), dan Pemerintahan Umum (09).

Tabel 4.1. Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Industri
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pertanian

02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Perkebunan
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Peternakan
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang badan usaha milik negara
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha kecil dan menengah
03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan kawasan daerah tertinggal
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang hukum
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagakerjaan

09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang informasi
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang aparatur negara

Selanjutnya berdasarkan referensi Proses Bisnis di tingkat nasional tersebut dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis, terdapat 2 (dua) kelompok referensi Proses Bisnis Kementerian, yaitu Proses Bisnis Utama dan; Proses Bisnis Pendukung .

Tabel 4.2. Referensi Proses Bisnis Kementerian

Proses Bisnis Utama		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.02.01.01	Hubungan Luar Negeri Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Asia, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Asia.

01.02.01.02	Hubungan Luar Negeri Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.
01.02.01.03	Hubungan Luar Negeri Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik.

01.02.01.04	Hubungan Luar Negeri Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional.
01.02.01.05	Hubungan Luar Negeri Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi multilateral	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi multilateral termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi multilateral.

02.01.01.01	Industri : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi.
02.01.01.02	Industri : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional.

02.01.01.03	Industri : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri.
02.02.01.01	Perdagangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan.

02.02.01.02	Perdagangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.
02.03.01.01	Pertanian : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan.

02.03.01.02	Pertanian : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.
02.04.01.01	Perkebunan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura.

02.04.01.02	Perkebunan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan.
02.05.01.01	Peternakan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

02.07.01.01	Badan Usaha Milik Negara : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia.
02.07.01.02	Badan Usaha Milik Negara : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata.

02.07.01.03	Badan Usaha Milik Negara : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi.
02.07.01.04	Badan Usaha Milik Negara : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur.

02.07.01.05	Badan Usaha Milik Negara : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang niaga dan transportasi.
02.10.01.01	Usaha Kecil dan Menengah : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital.

02.10.01.02	Usaha Kecil dan Menengah : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.
02.10.01.03	Usaha Kecil dan Menengah : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

03.05.01.01	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi.
03.05.01.02	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

03.05.01.03	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan.
03.05.01.04	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

03.05.01.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.
06.02.01.01	Ketenagakerjaan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

06.02.01.02	Ketenagakerjaan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.
09.02.01.01	Keuangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal.

09.02.01.02	Keuangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal.
09.02.01.03	Keuangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.

09.02.01.04	Keuangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
09.02.01.05	Keuangan : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Proses Bisnis Pendukung (02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
05.01.02.01	Hukum : Layanan Hukum	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait layanan hukum, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; - Penyusunan dan penetapan produk hukum; - Dokumentasi produk hukum; - Advokasi hukum.
09.02.02.01	Keuangan : perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait Pengelolaan perencanaan, penganggaran dan keuangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perencanaan dan penganggaran; - Pengelolaan keuangan; - Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; - Pengelolaan barang milik negara.

09.03.02.01	Informasi : manajemen komunikasi, informasi publik, data dan sistem informasi	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen komunikasi, informasi publik, data dan sistem informasi, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan opini publik; - Publikasi; - Pelayanan pengaduan dan informasi; - Koordinasi hubungan kelembagaan; - Dokumentasi kehumasan; - Pengelolaan data; - Pengelolaan sistem informasi.
09.06.02.01	Aparatur Negara : manajemen pengawasan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen pengawasan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pengawasan; - Pengorganisasian pengawasan; - Pelaksanaan pengawasan; - Pengendalian pengawasan; - Pengendalian manajemen resiko; - sistem pengendalian internal dan layanan konsultasi;

09.06.02.02	Aparatur Negara : manajemen organisasi dan reformasi birokrasi.	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen organisasi dan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penataan struktur organisasi dan sistem kerja; - penyusunan instrumen dasar pengelolaan jabatan; - pelaksanaan agenda reformasi birokrasi; - pengelolaan akuntabilitas kinerja;
09.06.02.03	Aparatur Negara : manajemen sumber daya manusia.	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen sumber daya manusia, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan SDM; - Pengadaan : rekrutmen dan seleksi; - Penatausahaan administrasi kepegawaian; - Pemberian gaji dan tunjangan; - Perlindungan dan jaminan; - Pengembangan kompetensi; - Pengembangan karir; - Penilaian kinerja, penghargaan dan

		<p>penegakan disiplin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberhentian.
09.06.02.04	Aparatur Negara : layanan umum dan persidangan.	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait layanan umum dan persidangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kerumahtanggaan; - Pengelolaan kearsipan; - Layanan keprotokolan; - Pengelolaan persidangan; - Fasilitasi penyiapan naskah menteri.

2. Referensi Data dan Informasi

Referensi data dan informasi Kementerian merupakan turunan dari referensi data dan informasi di tingkat nasional, yaitu Pertahanan dan Luar Negeri (01), Ekonomi dan Industri (02), Pembangunan Kewilayahan (03), Pendidikan dan Tenaga Kerja (06), dan Pemerintahan Umum (09).

Tabel 4.3. Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional
02.01	Data Industri	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Industri
02.02	Data Perdagangan	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan
02.03	Data Pertanian	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pertanian
02.04	Data Perkebunan	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Perkebunan
02.05	Data Peternakan	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian

		kebijakan di bidang Peternakan
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang badan usaha milik negara
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha kecil dan menengah
03.05	Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan kawasan daerah tertinggal
05.01	Data Hukum	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang hukum
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagakerjaan
09.02	Data Keuangan	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan

09.03	Data Informasi	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang informasi
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang mempresentasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang aparatur negara

Selanjutnya berdasarkan referensi data dan informasi tingkat nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis, terdapat 2 (dua) kelompok referensi data dan informasi Kementerian, yaitu Informasi Utama; dan Informasi Pendukung.

Tabel 4.4. Referensi Data dan Informasi Kementerian

Informasi Utama		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.02.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Asia, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Asia.
01.02.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

01.02.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik.
01.02.01.04	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional.

01.02.01.05	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi multilateral	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi multilateral termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi multilateral.
02.01.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi.

02.01.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional.
02.01.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri.

02.02.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan.
02.02.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

02.03.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan.
02.03.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

02.04.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura.
02.04.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan.

02.05.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.
02.07.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia.

02.07.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata.
02.07.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi.

02.07.01.04	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur.
02.07.01.05	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang niaga dan transportasi.

02.10.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital.
02.10.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.

02.10.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
03.05.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi.

03.05.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan.
03.05.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan.

03.05.01.04	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.
03.05.01.05	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

06.02.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
06.02.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

09.02.01.01	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal.
09.02.01.02	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal.

09.02.01.03	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.
09.02.01.04	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

09.02.01.05	Data Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.
-------------	---	--

Informasi Pendukung (02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
05.01.02.01	Data Layanan Hukum	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan layanan hukum, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; - Penyusunan dan penetapan produk hukum; - Dokumentasi produk hukum; - Advokasi hukum.

09.02.02.01	Data perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan Pengelolaan perencanaan, penganggaran dan keuangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perencanaan dan penganggaran; - Pengelolaan keuangan; - Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; - Pengelolaan barang milik negara.
09.03.02.01	Data manajemen komunikasi, informasi publik, data dan sistem informasi	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen komunikasi, informasi publik, data dan sistem informasi, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan opini publik; - Publikasi; - Pelayanan pengaduan dan informasi; - Koordinasi hubungan kelembagaan; - Dokumentasi kehumasan; - Pengelolaan data; - Pengelolaan sistem informasi.

09.06.02.01	Data manajemen pengawasan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen pengawasan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pengawasan; - Pengorganisasian pengawasan; - Pelaksanaan pengawasan; - Pengendalian pengawasan; - Pengendalian manajemen resiko; - sistem pengendalian internal dan layanan konsultasi;
09.06.02.02	Data manajemen organisasi dan reformasi birokrasi.	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen organisasi dan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penataan struktur organisasi dan sistem kerja; - penyusunan instrumen dasar pengelolaan jabatan; - pelaksanaan agenda reformasi birokrasi; - pengelolaan akuntabilitas kinerja;
09.06.02.03	Data manajemen sumber daya manusia.	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen sumber daya manusia, termasuk di</p>

		<p>dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan SDM; - Pengadaan : rekrutmen dan seleksi; - Penatausahaan administrasi kepegawaian; - Pemberian gaji dan tunjangan; - Perlindungan dan jaminan; - Pengembangan kompetensi; - Pengembangan karir; - Penilaian kinerja, penghargaan dan penegakan disiplin; - Pemberhentian.
09.06.02.04	Data layanan umum dan persidangan.	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan layanan umum dan persidangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kerumahtanggaan; - Pengelolaan kearsipan; - Layanan keprotokolan; - Pengelolaan persidangan; - Fasilitasi penyiapan naskah menteri.

3. Referensi Layanan SPBE

Referensi Layanan SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Layanan SPBE di tingkat nasional, yaitu Layanan Publik (01) dan Layanan Administrasi Pemerintahan (02).

Tabel 4.5. Referensi Layanan SPBE Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Layanan Publik		
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang Ekonomi termasuk di dalamnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Luar negeri, industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, badan usaha milik negara, usaha kecil dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan ketenagakerjaan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi kementerian
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan

02.09	Data dan Informasi Pemerintah	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.
-------	-------------------------------	--

Selanjutnya berdasarkan referensi Layanan SPBE di tingkat nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis, terdapat 2 (dua) kelompok referensi Layanan SPBE Kementerian, yaitu Layanan Utama; dan Layanan Pendukung.

Tabel 4.6. Referensi Layanan SPBE Kementerian

Layanan Utama		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.04.01.01	Layanan Ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia	Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Asia, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Asia.

01.04.01.02	Layanan Ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.
01.04.01.03	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik.

01.04.01.04	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi regional dan sub regional.
01.04.01.05	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi multilateral	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional, di bidang kerjasama ekonomi multilateral termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang kerjasama ekonomi multilateral.

01.04.01.06	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi.
01.04.01.07	Layanan ekonomi Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional.

01.04.01.08	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri.
01.04.01.09	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan.

01.04.01.10	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.
01.04.01.11	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan.

01.04.01.12	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.
01.04.01.13	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura.

01.04.01.14	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan	Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan.
01.04.01.15	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan	Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

01.04.01.16	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang migas, pertambangan dan petrokimia.
01.04.01.17	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata.

01.04.01.18	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi.
01.04.01.19	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur.

01.04.01.20	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang niaga dan transportasi.
01.04.01.21	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital.

01.04.01.22	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.
01.04.01.23	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

01.04.01.24	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi.
01.04.01.25	Layanan ekonomi terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

01.04.01.26	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan	Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan.
01.04.01.27	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi	Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

01.04.01.28	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.
01.04.01.29	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

01.04.01.30	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.
01.04.01.31	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal.

01.04.01.32	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal.
01.04.01.33	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.

01.04.01.34	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
01.04.01.35	Layanan ekonomi terkait Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah	<p>Kegiatan pelayanan terkait koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan agenda kebijakan; - Perumusan dan penetapan kebijakan; - Pelaksanaan kebijakan; serta - evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Informasi Pendukung (02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.28.02.01	Layanan Hukum	<p>Kegiatan pelayanan terkait layanan di bidang hukum, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; - Penyusunan dan penetapan produk hukum; - Dokumentasi produk hukum; - Advokasi hukum.

02.02.02.01	Layanan terkait keuangan	<p>Kegiatan pelayanan terkait Pengelolaan perencanaan, penganggaran dan keuangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perencanaan dan penganggaran; - Pengelolaan keuangan; - Pengelolaan pengadaan barang dan jasa; - Pengelolaan barang milik negara.
02.04.02.01	Aparatur Negara	<p>Kegiatan pelayanan terkait manajemen sumber daya manusia, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan SDM; - Pengadaan : rekrutmen dan seleksi; - Penatausahaan administrasi kepegawaian; - Pemberian gaji dan tunjangan; - Perlindungan dan jaminan; - Pengembangan kompetensi; - Pengembangan karir; - Penilaian kinerja, penghargaan dan penegakan disiplin; - Pemberhentian.
02.06.02.01	Dukungan Operasional Organisasi	<p>Kegiatan pelayanan terkait layanan umum dan persidangan, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kerumahtanggaan; - Pengelolaan kearsipan; - Layanan keprotokolan; - Pengelolaan persidangan; - Fasilitas penyiapan naskah menteri.

02.07.02.01	Akuntabilitas Kinerja	<p>Kegiatan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan akuntabilitas kinerja - Pelaporan kinerja
02.08.02.01	Organisasi dan Tata Kelola	<p>Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan, termasuk didalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penataan struktur organisasi dan sistem kerja; - penyusunan instrumen dasar pengelolaan jabatan; - pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
02.09.02.01	Data dan Informasi Pemerintah	<p>Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan, termasuk di dalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan opini publik; - Publikasi; - Pelayanan pengaduan dan informasi; - Koordinasi hubungan kelembagaan; - Dokumentasi kehumasan; - Pengelolaan data; - Pengelolaan sistem informasi.

4. Referensi Aplikasi SPBE

Referensi Aplikasi SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Aplikasi SPBE di tingkat nasional, yaitu Aplikasi Khusus (02), kode 02.01 dan 02.02. Selanjutnya berdasarkan referensi Aplikasi SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi Aplikasi SPBE Kementerian.

Tabel 4.7. Referensi Aplikasi SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.01.01	Aplikasi Misi Tertentu Kementerian	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus Kementerian, untuk mendukung misi tertentu. Berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus Kementerian.
02.02.01	Aplikasi Fungsi Tertentu Kementerian	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi fungsi khusus Kementerian. Berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus Kementerian.

5. Referensi Infrastruktur SPBE

Referensi Infrastruktur SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi infrastruktur SPBE di tingkat nasional, yaitu Fasilitas Komputasi (01), kode 01.01, 01.02, 01.03; Sistem Integrasi (02), kode 02.01, 02.02; dan Platform (03), kode 03.01, 03.02. Selanjutnya berdasarkan referensi infrastruktur SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi infrastruktur SPBE Kementerian.

Tabel 4.8. Referensi Infrastruktur SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01.01)		
01.01.01	Pusat Data Kementerian	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan dan pemulihan.
01.02.01	Pusat Komputasi Kementerian	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03.01	Pusat Kendali Kementerian	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02.01)		
02.01.01	Jaringan Intra Kementerian	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02.01	Sistem Penghubung Layanan Kementerian	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Platform (03.01)		
03.01.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02.01	Komputasi Awan Kementerian	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

6. Referensi Keamanan SPBE

Referensi Keamanan SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Keamanan SPBE di tingkat nasional, yaitu Standar Keamanan (01), kode 01.01, 01.02, 01.03; Penerapan Keamanan (02), kode 02.01, 02.02, 02.03, 02.04; dan Kelaikan Keamanan (03), kode 03.01, 03.02. Selanjutnya berdasarkan referensi Keamanan SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi Keamanan SPBE Kementerian.

Tabel 4.9. Referensi Keamanan SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01.01)		
01.01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Kementerian	Standar atau Peraturan Kementerian yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
01.02.01	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
01.03.01	Regulasi Kementerian lainnya	Peraturan Kementerian lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Keamanan SPBE Kementerian, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
Penerapan Keamanan (02.01)		
02.01.01	Kesadaran Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk meningkatkan kesadaran Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.02	Kerentanan Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.03	Peningkatan Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk meningkatkan Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden Keamanan SPBE Kementerian.
Kelaikan Keamanan (03.01)		
03.01.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi SPBE Kementerian	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi SPBE Kementerian dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Kementerian dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi SPBE Kementerian yang telah mendapatkan rekomendasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kelaikan keamanan.
03.02.01	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Kementerian dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Kementerian yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

B. Metadata Arsitektur SPBE Kementerian

Arsitektur SPBE Kementerian memiliki Model Metadata Arsitektur Kementerian yang disusun berdasarkan Model Metadata Arsitektur SPBE nasional. Metadata Arsitektur SPBE Kementerian merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar Domain Arsitektur SPBE Kementerian, dan memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian, proses menemukan kembali terhadap domain arsitektur.

1. Metadata Proses Bisnis

Entitas metadata arsitektur Proses Bisnis berisi Informasi Elektronik mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kementerian. Entitas metadata arsitektur Proses Bisnis mewakili referensi arsitektur Proses Bisnis Kementerian.

Tabel 4.10. Metadata Proses Bisnis Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Bisnis/Fungsi	Merupakan fungsi atau sub fungsi pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas Unit Kerja di

No	Nama Atribut	Keterangan
		Kementerian.
3	Uraian Bisnis/Fungsi	Merupakan uraian dari fungsi atau sub fungsi pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas Unit Kerja di Kementerian.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis yang dipilih.
5	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

2. Metadata Data dan Informasi

Entitas metadata arsitektur data dan informasi terhubung dengan media penyimpan dan selanjutnya digunakan dalam aplikasi.

Tabel 4.11. Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh Unit Kerja di Kementerian.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data .
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih.
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan

No	Nama Atribut	Keterangan
		kerahasiaan konten data .
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data.
9	Penanggung Jawab	Merupakan penanggung jawab dari data .
10	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.
12	Disagregasi Data	Memecah kategori data besar menjadi subkategori yang lebih spesifik.

3. Metadata Layanan SPBE

Entitas metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa fungsi dan sub fungsi pemerintahan di Kementerian. Entitas metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian berhubungan dengan arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 4.12. Metadata Layanan SPBE Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh Unit Kerja di Kementerian.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan.
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-

No	Nama Atribut	Keterangan
		fungsi yang terdapat dalam layanan.
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE Kementerian yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih.
6	Unit Pelaksana	Merupakan Unit Kerja yang melaksanakan layanan.
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan IPPD terkait dengan layanan.
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan.
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan.
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

4. Metadata Aplikasi SPBE

Entitas metadata arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian menjadi entitas yang mempergunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diinginkan. Aplikasi memerlukan sebuah *platform* yang dikelola melalui domain arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian.

Tabel 4.13. Metadata Aplikasi SPBE Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.



No	Nama Atribut	Keterangan
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata arsitektur data dan informasi.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (desktop; web; cloud; atau mobile).
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>).
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.

No	Nama Atribut	Keterangan
15	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
16	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
17	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

5. Metadata Infrastruktur SPBE

Entitas metadata arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas metadata arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian saling terkait satu sama lain.

Tabel 4.14. Metadata Komputasi Awan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Government Cloud	Nama government cloud yang digunakan.
3	Deskripsi Government Cloud	Penjelasan dari government cloud yang digunakan.
4	Tipe Government Cloud	Jenis dari government cloud yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari government cloud yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Nama pemilik government cloud yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan government cloud.
8	Unit Pengembang Government Cloud	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan government cloud.
9	Unit Operasional Government Cloud	Unit operasional government cloud yang digunakan.
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan government cloud.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

Tabel 4.15. Metadata Perangkat Lunak Platform

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Perangkat Lunak	Nama perangkat lunak yang digunakan.
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari perangkat lunak yang digunakan.
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari perangkat lunak yang digunakan (sistem operasi, sistem utilitas, atau sistem database).
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis Lisensi	Jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan (lisensi seumur hidup, lisensi periodik, atau kode sumber terbuka).
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak.
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

Tabel 4.16. Metadata Perangkat Keras Server

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut antara lain web server, mail server, aplikasi, database, file server, active directory, dan keamanan informasi.



No	Nama Atribut	Keterangan
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan.
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB).
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: High End, Mid End, Low End.
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID).
14	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.17. Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Data Storage	Nama dari data storage yang digunakan.
3	Deskripsi Data Storage	Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan.
4	Data Storage yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data dan informasi.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Data Storage	Unit pengelola data storage yang digunakan.
8	Lokasi Data Storage	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
11	Metode Akses Data	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (Direct Attached

No	Nama Atribut	Keterangan
	Sharing	Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS).
12	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.18. Metadata Perangkat Keras Jaringan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Network/ Communication Device	Nama Network/Communication Device yang digunakan.
3	Deskripsi Network/ Communication Device	Penjelasan dari Network/Communication Device yang digunakan.
4	Tipe Network/ Communication Device	Jenis dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari network/communication device yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik network/communication device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Network/ Communication Device	Unit pengelola network/communication device yang digunakan.

No	Nama Atribut	Keterangan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.19. Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Security Device	Nama dari security device yang digunakan.
3	Deskripsi Security Device	Penjelasan dari security device yang digunakan.
4	Tipe Security Device	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari security device yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik security device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Security Device	Unit pengelola security device yang digunakan.
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.20. Metadata Perangkat Keras Periferal

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Periferal	Nama periferal yang digunakan.
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari periferal yang digunakan.
4	Tipe Periferal	Jenis dari periferal yang digunakan (input, output, input/output).
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola Network/ Communication Device	Unit pengelola periferal yang digunakan
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.21. Metadata Sistem Penghubung Layanan Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / sistem penghubung non pemerintah).
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung

No	Nama Atribut	Keterangan
		yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama Jaringan Intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan Jaringan Intra didapat dari metadata Jaringan Intra pemerintah.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.22. Metadata Jaringan Intra Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan.
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan.
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan.
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan.

No	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan Unit Kerja pengelola jaringan.
8	Bandwidth	Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia.
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan.
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.23. Metadata Fasilitas Komputasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih.
4	Bandwidth Intranet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun.
5	Bandwidth Internet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun.
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas.
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas.
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas fasilitas.
9	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas.

No	Nama Atribut	Keterangan
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengamanan fasilitas.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

6. Metadata Keamanan SPBE

Entitas metadata arsitektur Keamanan SPBE Kementerian merupakan metadata yang menginformasikan pengamanan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian, serta domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian yang direpresentasikan dalam bentuk metadata manajemen keamanan.

Tabel 4.24. Metadata Manajemen Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas Kementerian diantaranya: 1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur Keamanan SPBE; 2. standar internasional terkait keamanan informasi; atau regulasi lainnya.
2	Keterangan Nama Standar	Nama dari jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas Kementerian.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Hasil dari pelaksanaan audit Keamanan SPBE Kementerian untuk Aplikasi SPBE Kementerian dan Infrastruktur SPBE Kementerian yang terdiri dari: 1. belum/tidak dilaksanakan; 2. memadai; 3. perlu peningkatan; dan 4. tidak memadai. (Ket: Untuk data dan informasi tidak

No	Nama Atribut	Keterangan
		dilakukan Audit Keamanan)
4	Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanggal penyerahan laporan audit Keamanan SPBE Kementerian terbaru untuk Aplikasi SPBE Kementerian dan Infrastruktur SPBE Kementerian yang bersesuaian. (Ket: Untuk data dan informasi tidak dilakukan audit keamanan, atribut ini tidak terbuka bila atribut audit Keamanan SPBE dijawab dengan “belum/tidak dilaksanakan”)
5	Penerapan Keamanan	Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE Kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE Kementerian. Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: 1. edukasi kesadaran Keamanan SPBE; 2. penilaian kerentanan Keamanan SPBE; 3. peningkatan Keamanan SPBE; dan penanganan insiden Keamanan SPBE.
6	Kelaikan Keamanan	Pemberian pertimbangan kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan Aplikasi Umum SPBE Kementerian, dan persyaratan keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.



7. Metamodel Arsitektur SPBE Kementerian

Sesuai dengan Domain Arsitektur SPBE Kementerian, maka setiap domain memiliki Metadata Arsitektur SPBE Kementerian, dengan relasi sebagai berikut:

- a. Domain arsitektur Proses Bisnis dengan metadata arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain arsitektur data dan informasi dengan metadata arsitektur data dan informasi;
- c. Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian dengan metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian;
- d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian dengan metadata arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
- e. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian dengan metadata sebagai berikut:

1) Metadata platform terdiri dari:

- metadata komputasi awan;
 - metadata perangkat lunak platform;
 - metadata perangkat keras server;
 - metadata perangkat keras media penyimpanan;
 - metadata perangkat keras jaringan;
 - metadata perangkat keras keamanan;
 - metadata perangkat keras periferal;

2) Metadata sistem integrasi terdiri dari:

- metadata Sistem Penghubung Layanan pemerintah;
- metadata Jaringan Intra pemerintah;

3) Metadata fasilitas komputasi.

8. Domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian dengan metadata manajemen keamanan.

BAB V

ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

A. Domain Arsitektur SPBE Kementerian 2022 - 2026

Domain Arsitektur SPBE Kementerian yang ditargetkan akan dicapai sampai dengan tahun 2026 merupakan substansi Arsitektur SPBE Kementerian yang memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE Kementerian di keenam domain Arsitektur SPBE Kementerian seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur Proses Bisnis Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Proses Bisnis Utama (09.05.01)
- b. Proses Bisnis Manajemen (09.05.02)
- c. Proses Bisnis Pendukung (09.05.03)

2. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Informasi Utama (09.05.01)
- b. Informasi Manajemen (09.05.02)
- c. Informasi Pendukung (09.05.03)

3. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain Layanan SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Layanan Utama (02.03.01)
- b. Layanan Manajemen (02.03.02)
- c. Layanan Pendukung (02.03.03)

4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Aplikasi Misi Tertentu Kementerian (02.01.01)
- b. Aplikasi Fungsi Tertentu Kementerian (02.02.01)

5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Substansi arsitektur pada domain Infrastruktur SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Fasilitas Komputasi (01.01)
- b. Sistem Integrasi (02.01)
- c. Platform (03.01)

6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain Keamanan SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Standar Keamanan (01.01)
- b. Penerapan Keamanan (02.01)
- c. Kelaikan Keamanan (03.01)

B. Penerapan Arsitektur SPBE Kementerian 2022 – 2026

Dalam rangka mendukung berbagai rencana pembangunan nasional tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang merupakan tujuan (to-be) dari berbagai pembangunan nasional, maka pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kementerian dengan penerapan Arsitektur SPBE Kementerian diharapkan dapat menjadi katalisator. Arsitektur SPBE Kementerian diharapkan juga dapat berperan sebagai fungsi integrasi dan harmonisasi tata kelola pemerintahan berbasis SPBE.

Selaras dengan pelaksanaan rencana inisiatif strategis pada Rencana Induk SPBE Nasional dan pelaksanaan berbagai proyek prioritas strategis, maka ditargetkan hingga tahun 2026 penerapan Arsitektur SPBE Kementerian dapat dilakukan pada kegiatan prioritas yang telah diidentifikasi, yaitu pada bagian tematik layanan administrasi pemerintah (G2G dan G2E) dalam rangka mendukung terwujudnya *New Ways of Working* (NwoW) berbasis digital pada IKN baru.

Penerapan Arsitektur SPBE Kementerian yang ditargetkan sampai dengan tahun 2026 merupakan bentuk transformasi digital Kementerian, yang dilakukan dengan melakukan berbagai transformasi, baik transformasi Proses Bisnis hingga transformasi teknologi. Transformasi tersebut dilakukan sesuai arah kebijakan Arsitektur SPBE nasional yakni pada bidang pembangunan pemerintahan umum.

C. Peta Rencana Strategis SPBE Kementerian

Peta rencana strategis SPBE Kementerian berisi berbagai inisiatif strategis yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kementerian. Secara garis besar, peta rencana strategis SPBE Kementerian terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yakni:

1. Tahapan pembangunan fondasi SPBE Kementerian (2022 s.d. 2023), difokuskan pada penguatan Tata Kelola SPBE Kementerian, Infrastruktur SPBE Kementerian sebagai fondasi pelaksanaan SPBE Kementerian yang terpadu dan menyeluruh;
2. Tahapan pengembangan SPBE Kementerian (2024 s.d. 2026), difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE Kementerian yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan pemerintah tingkat Kementerian.

Inisiatif strategis SPBE Kementerian dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE Kementerian dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE Kementerian, Layanan SPBE Kementerian, TIK di Kementerian, dan Sumber Daya Manusia di Kementerian.

Tabel 5.1. Peta Rencana Strategis SPBE Kementerian

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
Tata Kelola SPBE Kementerian				
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian	Termanfaatkannya Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Arsitektur SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kementerian	Tim Koordinasi SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3	Rencana dan Anggaran berbasis Arsitektur SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
4	Penguatan Kebijakan SPBE Kementerian	Kebijakan SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
				Tata Laksana
5	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE Kementerian	Evaluasi SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Audit TIK Kementerian	2022 - 2026	Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Bidang Kinerja Kelembagaan
6	Penyelenggaraan Manajemen Perubahan SPBE Kementerian	Manajemen Perubahan SPBE	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Layanan SPBE Kementerian				
1	Survei Pengguna SPBE Kementerian	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2	Portal Pelayanan Publik Kementerian yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Kementerian dengan Pemerintah Pusat.	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Pemanfaatan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
3	Portal Pelayanan Administrasi Kementerian yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Administrasi Kementerian dengan	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Pemerintah Pusat		
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Kepegawaian	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Kearsipan	2022 - 2026	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Pengaduan Publik	2022 - 2026	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		Pemanfaatan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Layanan Administrasi lainnya yang ditetapkan secara	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Nasional		
4	Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE Kementerian	Manajemen Layanan SPBE Kementerian, dan Pemanfaatan Portal Pusat Layanan	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaaan Pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian				
1	Penyediaan Pusat Data Kementerian	Integrasi Pusat Data Kementerian dengan Pusat Data Nasional	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaaan Pembangunan
2	Penyediaan Jaringan Intra Kementerian	Jaringan Intra Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Terkoordinasinya Jaringan Intra Kementerian dengan Pusat Pengendalian Jaringan Intra Pemerintah	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
3	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian	Terintegrasinya Sistem Penghubung Layanan Kementerian dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaaan Pembangunan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
4	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE Kementerian	Penyediaan Jaringan Internet Yang Berkualitas	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
5	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	<i>Cloud Service</i> Kementerian, <i>Repository</i> Aplikasi Khusus	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
6	Pembangunan Portal Data Elektronik Kementerian	Portal Data Elektronik Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Integrasi Portal Data Elektronik Kementerian dengan Portal Data Nasional	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
7	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Kementerian	Manajemen Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Teknologi Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Budaya Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Seluruh Unit Kerja di Kementerian

8	Pengembangan Teknologi Analitika Data Elektronik Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat	Teknologi Analitika Data Elektronik	2022 - 2026	Pusat Data Elektronik dan Informasi Perencanaan Pembangunan
---	---	--	----------------	---

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dan Akurat	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Analitika Data	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Penerapan Analitika Data	2022 - 2026	Seluruh Unit Kerjadi Kementerian
9	Penyelenggaraan Manajemen TIK SPBE Kementerian	Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Manajemen Aset TIK.	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sumber Daya Manusia Kementerian				
1	Promosi Literasi SPBE Kementerian	Pelatihan dan Sosialisasi	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
2	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE Kementerian	Termanfaatkannya Standar Kompetensi Teknis SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Termanfaatkannya Pola Remunerasi Bidang SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana



No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
3	Forum Kolaborasi SPBE	Termanfaatkannya Forum Kolaborasi SPBE Nasional	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
4	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE Kementerian	Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO